

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amrani Hanafi, 2019, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta.
- Arief Barda Nawawie, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 2020, *Teori Hierarki Norma Hukum*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta.
- Bakhri Syaiful, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- _____, 2010, *Kebijakan Kriminal: Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Butarbutar Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi Adami, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 2017, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Eddyono Sri Wiyanti (Editor), 2020, "Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020)", Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Efendi A'an, et al., 2016, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Efritadewi Ayu, 2020, *Modul Hukum Pidana*, UMRAH Press, Tanjungpinang.
- Fauzi Agus Machfud, 2018, *Politik Kebijakan Pemberantasan Korupsi*, Unesa University Press, Surabaya.
- Friedman Lawrence M., 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, Diterjemahkan Oleh M. Khozim, 2009, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung.

- _____, 1998, *American Law an Introduction: Second Edition*, Diterjemahkan Oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar: Edisi Kedua*, PT. Tatanusa, Jakarta
- Fuady Munir, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Handrawan, 2019, *Pencabutan Hak Politik Dalam Pidanaan Tindak Pidana Korupsi*, Media Sahabat Cendekia, Surabaya.
- Hartono Siti Soemantri, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Harun Refly, 2021, *Hukum BUMN (Badan Usaha Milik Negara)*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hiariej Eddy O.S., 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- _____, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Is Muhamad Sadi, 2016, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Jurdi Fajlurrahman, 2019, *Logika Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Khairandy Ridwan, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2019, *Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan*, Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Krisnawati Dani, et al., *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta Selatan.
- Kristian, 2016, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara (Buku Dua)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2018, *Sisitem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Latif Yudi, 2015, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Ilyas Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, AURA (CV. Anugrah Utama Raharja), Bandar Lampung.
- Marpaung Leden, 2017, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mochtar Zainal Arifin dan Eddy O.S. Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, Indonesia.
- Muhammad Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi Lilik, 2021, *Membangun Model Ideal Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan*, Kencana, Jakarta.
- Pohan Agustinus (Editor), et al., 2012, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Denpasar.
- _____, et al., 2008, *Pengembalian Aset Kejahatan*, Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Posner Richard A., 2014, *Economic Analysis of Law, Ninth edition*, Wolters Kluwer Law & Business, New York.
- Prasetya Rudhi, 2014, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prasetyo Teguh dan Arie Purnomosidi, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung.
- Priyatno Dwidja dan Kristian, 2017, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Priyatno Dwidja, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV Utomo, Bandung.
- Priyoko Robert, 2015, *Doktrin Business Judgment Rule: Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Pujiyono, 2014, *Hukum Perusahaan*, CV. Indotama Solo, Surakarta.
- Raharjo Satjipto, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

- Rifai Eddy, 2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Setiyono H., 2005, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Buku 1 Akar Filosofis*, Genta, Yogyakarta.
- Sianturi S.R. dan Mompang L. Panggabean, 1996, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Simpson Sally S., 2005, *Corporate Crime, Law, and Social Control*, Cambridge University Press, New York.
- Situmorang Victor M. dan Hendri Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Shipley Tom, 2022, "Investing With Integrity: The Benefits And Challenges of Integrating High Business Integrity Standards In Impact Investments", British International Investment, United Kingdom.
- Sjawie Hasbullah F., 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenadamedia Group, Depok.
- Soekanto Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, PT. Balai Pustaka (Persero), Jakarta Timur.
- Sugianto Fajar, 2013, *Economic Aproach To Law*, Kencana, Jakarta.
- Sumardjono Maria SW., 2019, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Suparmoko M., 2013, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik Edisi Keenam*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Suparni Niniek, 1996, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsuddin Aziz, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaja Gunawan, 2004, *Tanggungjawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Widyawati Anis dan Ade Adhari, 2020, *Hukum Penitensier di Indonesia: Konsep dan Perkembangannya*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Yunara Edi, 2012, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Berikut Studi Kasus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Zaidan M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republikindonesiatahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2041, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957.

Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi.

Perja Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1492).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013.

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Dps atas nama terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa.

Putusan Nomor 1577 K/Pid.Sus/2016 atas nama terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa.

Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst. Atas Nama Terdakwa PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk (PT NKE) (Sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah, Tbk).

Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi/Karya Ilmiah Lainnya

Ade Mahmud, “Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal *Hukum Mimbar Justitia*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2017.

_____, “Problematisasi Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi: Kajian Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR”, *Jurnal Yudisial*, Volume 11, Nomor 3, Desember 2018.

Ardison Asri, “Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 8 Nomor 1, September 2017.

Arhjayati Rahim dan Noor Asma, “Analisis Substansi Pidana Uang Pengganti Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi”, *Gorontalo Law Review*, Volume 3 Nomor 1, April 2020.

Arif Suhermanto, 2021, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Badan Usaha Milik Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta, Konsentrasi Hukum Bisnis, Yogyakarta.

Bilin Santoriko Sinaga, et al., “Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Propinsi Sumatera Utara”, *Jurnal Prointegritas*, Volume 6, Nomor 1, April 2022.

Budi Suhariyanto, “Penerapan Pidana Uang Pengganti Kepada Korporasi Dalam Perkara Korupsi Demi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara”, *Jurnal RechtsVinding*, Volume 7 Nomor 1, April 2018.

- _____, “Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16 No. 2, Juni 2016.
- Chandra Ayu Astuti dan Anis Chariri, “Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Diponegoro Journal of Accounting*, Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015.
- Devi Eka Verawati dan Otto Yudianto, “Urgensi Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara”, *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 1, Nomor 2, 2022.
- Diky Anandya Kharystya Putra dan Vidya Prahassacitta, “Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia”, *Indonesia Criminal Law Review*, Volume 01, Number 1, Tahun 2021.
- Elizabeth Asiedu, “The Effect of Corruption on Investment Growth: Evidence from Firms in Latin America, Sub-Saharan Africa and Transition Countries”, *Article*, Department of Economics University of Kansas, Lawrence, Kansas City.
- Elvira Pupovic, “Corruption's Effect on Foreign Direct Investment - The Case of Montenegro”, *Economic Review – Journal of Economics and Business*, Volume X, Issue 2, November 2012.
- Febri Ramadhan, 2019, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Subsider Terhadap Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Henny Yuningsih, et al., “Ratio Legis of Chemical Castration to the Perpetrators of Sexual Violence against Children”, *Sriwijaya Law Review*, Volume 4, Issue 2, July 2020.
- Herlambang P. Wiratraman dan Widodo D. Putro, “Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner Dalam Pendidikan Hukum Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 3, Oktober 2019.
- Hibatur Rahman, et al, “Analisis Dampak Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Desa Kebonagung Sidoarjo”, *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Volume 2, Nomor 05, September 2022.
- Husin Wattimena, “Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”, *Jurnal Tahkim*, Volume XII, Nomor 2, Desember 2016.

- Imami Nur Rachmawati, “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara”, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Volume 11, Nomor 1, Maret 2007.
- Indra Hafid Rahman, 2016, “Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Magelang.
- J.W. Neyers, “A Theory of Vicarious Liability”, *Alberta Law Review*, Volume 43, Nomor 2, 2005.
- Jimmy Tawalujan, “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan”, *Lex Crimen*, Volume 1, Nomor 3, Juli-Sepetember 2012.
- Kenneth B. Watt, “Piercing the Corpor cing the Corporate Veil: A Need for Clarification of Oklahoma eil: A Need for Clarification of Oklahoma's Approach”, *Tulsa Law Review*, Volume 28, Nomor 4, 1993.
- Madaskolay Viktoris Dahoklory, “Dinamika Pengelolaan Keuangan Bumh Perihal ”Dilema” Antara Kerugian Negara Ataupun Kerugian Bisnis”, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 9, Nomor 3, Desember 2020.
- Maya Hildawati Ilham, “Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)”, *Jurnal Verstek* Volume 7, Nomor 3, Desember 2019.
- Mia Natalina, 2021, “Eksekusi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta) Konsentrasi Hukum Litigasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mulyadi Alrianto Tajuddin, “Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Sebagai Premium Remedium Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara”, *Jurisprudentie*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2015.
- Nur Ainiyah Rahmawat, “Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium”, *Recidive*, Volume 2, Nomor 1, Januari - April 2013.
- Puteri Hikmawati, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?”, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 10, Nomor 1, Juni 2019.
- Reva Amalia, 2021, “Gagasan Mmasukkan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi ke Dalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Ridwan Khairandy, “Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Nomor 1, Volume 20, Januari 2013.
- Rizka Ananda Ponty Wijati, 2018, “Pemidanaan Korporasi Terhadap Ketidakmampuan Membayar Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Rizky Novian Hartono, “Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule”, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Volume 2, Nomor 1, April 2021.
- Robertson, 2021, “Pidana Uang Pengganti Sebagai Kebijakan Pidana (Penal Policy) Untuk Memulihkan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)”, *Disertasi*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
- Saiful Anwar, “Analisis Penetapan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta (Kasus Korupsi Dana Hibah Pemerintah Daerah kepada KONI)”, *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, Volume 5, Nomor 2, Mei 2017.
- Salman Luthan, “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi”, *Jurnal Hukum* Nomor 1, Volume 16, Januari 2009.
- Shidarta, 2016, “Pemosisian Landasan Teoretis dalam Penelitian Hukum”, *Paper*, Binus University Faculty of Humanities.
- Sigid Riyanto, 2021, “Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Suhariyono AR, “Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 6, Nomor 4, Desember 2009.
- Syahrul Hanafi, “Pengaruh Korupsi Terhadap Pembangunan Manusia di Indonesia”, *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 4, Nomor 1, April 2018.
- Tan Cheng Han, *et al.*, “Piercing the Corporate Veil: Historical, Theoretical and Comparative Perspectives”, *NUS Law Working Paper 2018/025*, September 2018, Faculty of Law Nasional University of Singapore.

Timothy P. Glynn, “Beyond “Unlimiting” Shareholder Liability: Vicarious Tort Liability for Corporate Officers”, *Vanderbilt Law Review*, Volume 57, nomor 2, MARCH 2004.

Yafet Y. W. Rissy, “Doktrin Piercing The Corporate Veil: Ketentuan Dan Penerapannya Di Inggris, Australia Dan Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 1, 2019.

Zul Afiatul Kharisma, *et al*, “Model Pertanggungjawaban Atas Tindak Pidana Korupsi oleh BUMN Sebagai Korporasi: Antara Tanggungjawab Korporasi dan Pengurus”, *Jurnal Lex Generalis*, Volume, 2 Nomor 12, Desember 2021.

Website/Internet

BBC News Indonesia, 2020, “Omnibus law: Jokowi Persilakan Penolak UU Cipta Kerja Gugat ke MK, Setelah Demonstrasi Besar Di Berbagai Kota”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54410069>, diakses pada Rabu, 19 Juli 2023.

BPKP, 2019, “Penghitungan Kerugian Negara” *Power Point*, <https://acli.kpk.go.id/materi-pembelajaran/tata-kelola-pemerintahan/slide-presentasi/perhitungan-kerugian-negara>, Pusat Edukasi Anti Korupsi, diakses pada Rabu, 24 Mei 2023, slide 11.

Budiman Slamet (Widyaiswara Madya pada Pusdiklatwas BPKP), “Metode Penghitungan Kerugian Negara Dalam Audit Investigatif”, [bpkp.go.id., https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/asset/files/post/20131202_165551/KTI%20%20Perhitungan%20KN.pdf](https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/asset/files/post/20131202_165551/KTI%20%20Perhitungan%20KN.pdf), hlm. 2, diakses pada Selasa, 23 Mei 2023.

David Garland, 2020, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*, Oxford Scholarship Online, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199258024.003.0006>, hlm. 139, diakses pada Sabtu, 27 Mei 2023.

Diana Kusumasari, 2012, “Apa Arti Subyek Hukum dan Subsider?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-arti-subyek-hukum-dan-subsider--lt4f537a3a96a05>, diakses pada Minggu, 11 Desember 2022.

Emerson Yuntho (Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch), 2018, “Kala Korporasi Terjerat Korupsi”, Indonesian Corruption Watch, <https://antikorupsi.org/id/article/kala-korporasi-terjerat-korupsi>, diakses pada Rabu, 31 Mei 2023.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, “Kebijakan Sosial”, Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, <https://pembangunansosial.fisipol.ugm.ac.id/kebijakan-sosial/>, diakses pada Jumat, 23 Juni 2023.

- Fitri Novia Heriani, 2021, “Siapa Berhak Menetapkan Kerugian Negara di Kasus Tipikor? Ini Penjelasan Hukumnya”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-berhak-menetapkan-kerugian-negara-di-kasus-tipikor-ini-penjelasan-hukumnya-lt61bb7b4ad897c/?page=2>, diakses pada Minggu, 11 Desember 2022.
- Franklin A. Gevurtz, 1994, “The Business Judgment Rule: Meaningless Verbiage or Misguided Notion?”, McGeorge School of Law Scholarly Articles, University of the Pacific, hlm. 290, <https://core.ac.uk/download/pdf/303865796.pdf>, diakses pada Rabu, 31 Mei 2023.
- Issha Harruma, 2022, “Deretan Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia”, Kompas.Com, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/01300021/deretan-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia>, diakses pada Rabu, 31 Mei 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), “Subsider”, <https://www.kbbi.web.id/subsider>, diakses pada Minggu, 11 Desember 2022.
- Muhammad Yasin, 2019, “Kebijakan Antikorupsi dari Penguasa Militer”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kebijakan-antikorupsi-dari-penguasa-militer-lt5da550bcc353b/?page=1#!>, diakses pada Rabu, 29 Maret 2023.
- Rizkisyah Karoen N., “Resensi Uang Pengganti”, <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/577>, diakses pada Jumat, 28 April 2023.
- Surya Hadi Purnama, 2021, “Pengelolaan Barang Rampasan dan Pemulihan Aset Tindak Pidana”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html>, diakses pada Rabu, 19 Juli 2023.
- Syafrudin, 2014, “Optimalisasi Sinergisitas Antara Lembaga Penegak Hukum Lembaga Pengawas Keuangan Guna Meningkatkan Efektivitas Pemberantasan Korupsi Dalam Rangka Pembangunan Nasional”, Perpustakaan Lemhannas RI, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000185/swf/4544/files/basic-html/page1.html>, diakses pada Rabu, 29 Maret 2023.
- Wikipedia, “Paadoks”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Paradoks>, diakses pada Minggu, 9 April 2023.

Willa Wahyuni, 2022, “Perusahaan Berbadan Hukum dan Perusahaan Tidak Berbadan Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perusahaan-berbadan-hukum-dan-perusahaan-tidak-berbadan-hukum-lt62fa2c2107e88/>, diakses pada Rabu, 19 Juli 2023.

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Aan (Salah Satu Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia) pada Selasa, 4 April 2023 di Gedung Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta Selatan.

Hasil wawancara dengan Ali Rizky (Salah Satu Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo) pada Senin, 8 Mei 2023 di Lantai 3 Gedung Utama Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara.

Hasil wawancara dengan Didik Kurniawan (Kasi Wilayah I Subdit Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Direktorat Penuntutan Jampidsus Kejaksaan Agung RI) pada Selasa, 4 April 2023 di Gedung Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI.

Hasil wawancara dengan Handoko Alfiantoro (salah satu penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi), pada Senin, 29 Mei 2023 via Zoom Meeting.

Hasil wawancara dengan Handrawan (Salah Satu Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo), Interview dilakukan di Kendari pada Rabu, 3 Mei 2023.

Hasil wawancara dengan Haris Yusuf Abadi (Kepala Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo) pada Rabu, 3 Mei 2023 di Ruang Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara.

Hasil wawancara dengan Idris Saputra (Salah Satu Dosen Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo) pada Senin, 8 Mei 2023 di Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara.

Hasil wawancara dengan IG Eko Purwanto (Salah Satu Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) pada Jumat, 31 Maret 2023, di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hasil wawancara dengan salah satu Hakim Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Selasa, 14 Maret 2023 di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sumber Lainnya

Agung Satria Palgun dan I Gusti Ketut Ariawan, Analisis Yuridis Pembebanan Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022, “Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana”, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015, “Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime (European Treaty Series-Number 141).

DPR RI, 1999, *Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang – Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Masa Persidangan ke-IV, Rapat Ke-13*, Sekretariat Panitia Khusus Set-Jen DPR-RI, Jakarta.

_____, 1999, *Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Rapat Ke-5 Rapat Dengar Pendapat Dengan Pakar Hukum, Sekretariat Panitia Khusus Set-Jen DPR-RI, Jakarta.

_____, 1999, *Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Masa Persidangan IV Rapat Ke-15*, Sekretariat Panitia Khusus Set-Jen DPR-RI, Jakarta.

_____, 1999, *Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Masa Persidangan ke-III, Rapat Ke-5*, Sekretariat Panitia Khusus Set-Jen DPR-RI, Jakarta.

Marcus Priyo Gunarto pada 15 Maret 2022 disampaikan saat mengajar matakuliah Sistem Peradilan Pidana pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM.

Supriyadi, 2022, “Mata Kuliah Kebijakan Hukum Pidana”, Disampaikan saat menjawab pertanyaan penulis pada pembelajaran mata kuliah kebijakan hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

United Nation Convention Againts Corruption.

United States Departement of State, 2005, “U.S. Asset Recovery Tools and Procedures: A Practical Guide for International Cooperation”, New York and Washington DC.